

**PERSEPSI MANAJEMEN PERBANKAN MENGENAI
MANFAAT DAN FUNGSI KOMITE AUDIT DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

(Untuk Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta atau
Bursa Efek Surabaya Dan Memiliki Kantor Cabang Di Jember)

SKRIPSI



UNIT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



	Hadiah	Klasa
	12 MAY 2005	657.0333
Oleh :	Pengkatalog :	kur P

ADISTI KURNIADARI

NIM : 000810301267

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2005**



**PERSEPSI MANAJEMEN PERBANKAN MENGENAI
MANFAAT DAN FUNGSI KOMITE AUDIT DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

**(Untuk Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta atau
Bursa Efek Surabaya Dan Memiliki Kantor Cabang Di Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Oleh :

ADISTI KURNIADARI

(000 810 30 1267)

Dosen Pembimbing I :

Dra. Yosefa Sayekti, Ak., M.Com.

Dosen Pembimbing II :

Dra. Ririn Irmadariyani, Ak., M.Si.

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2005

**PERSEPSI MANAJEMEN PERBANKAN MENGENAI MANFAAT DAN FUNGSI KOMITE
AUDIT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

**(Untuk Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Atau
Bursa Efek Surabaya Dan Memiliki Kantor Cabang Di Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ADISTI KURNIADARI

NIM : 000 810 30 1267

Jurusan : AKUNTANSI / S1

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

30 April 2005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

1. Indah Purnamawati, SE, Ak.
NIP. 132 163 903

Anggota I,

3. Dra. Yosefa Sayekti, Ak., M.Com
NIP. 131 884 898



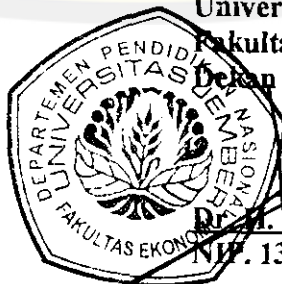
Sekretaris,

2. Alfi Arief, SE, Ak.
NIP. 132 232 793

Anggota II,

4. Dra. Ririn Irmadarivani, Ak. M.Si.
NIP. 132 002 081

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi



Dekan
Dr. A. Barwedi, MM
NIP. 131 276 658

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Persepsi Manajemen Perbankan Mengenai Manfaat Dan Fungsi Komite Audit
Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(*Good Corporate Governance*)
(Untuk Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Atau Bursa Efek
Surabaya Dan Memiliki Kantor Cabang Di Jember)

Nama Mahasiswa : ADISTI KURNIADARI

NIM : 000 810 30 1267

Jurusan : AKUNTANSI (S-1)

Pembimbing I



Dra. Yosefa Sayekti, Ak., M.Com

NIP. 131 884 898

Pembimbing II



Dra. Ririn Irmadariyani, Ak., M.Si.

NIP. 132 002 081

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Imam Mas'ud, Ak., MM.

NIP. 131 832 326

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya : Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS. Al-Mujaadilah : 11)

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui (QS. Al-Anbiyaa' : 7)

Kesuksesan bukan sesuatu kebetulan, tapi memerlukan persiapan yang matang, kerja keras, dan niat yang baik. Kalau menghadapi kesulitan, hadapi karena itu salah satu pintu keberhasilan.

(Andrie Wongso)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

❧ *Ayahanda Marsaid dan Ibunda Sukatmi, terima kasih atas do'a, bimbingan, dan kasih sayangnya bagi kesuksesan ananda.*

❧ *Eyang putri, makasih do'a restunya.*

❧ *Seseorang yang mencintaiku dan menyayangiku sepenuh hati serta bisa menerima semua keadaanku dengan tulus ikhlas. Makasih atas "supportnya" dan semoga hari esok akan lebih baik.*

❧ *ALMAMATERku Tercinta. Amin...*

Persepsi Manajemen Perbankan Mengenai Manfaat Dan Fungsi Komite
Audit Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(*Good Corporate Governance*)
(Untuk Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Atau Bursa Efek
Surabaya Dan Memiliki Kantor Cabang Di Jember)

Abstract

Good corporate governance is a corporate governance principle to increase the corporate performance and give economic value for the stockholders. The base principles of good corporate governance concept are fairness, responsibility, accountability, and transparency. These principles require the company to report all of its activities not to stockholders only, but also to another people that use income statement.

Audit committee is one of the important element in applying good corporate governance concept. Audit committee help the board of director to monitoring the corporate governance. But, in another side, the existence of this committee still being a interesting discussion, so that the position of audit committee can be said in "grey area".

The purpose of this research is to understand how is banking listed companies management's perception toward the function and benefit of audit committee. Research samples are banking listed companies management which have position as a middle or top management. Researcher was distributed 25 questioners to 5 companies. From the survey, researcher got 20 reply (80 %) of 5 companies. The statistical methods of Mann-Whitney U Test were used to test difference perception among the respondent. Respondent classified by level management, companies ownership of audit committee, department, duration of position, duration of go pubic, and education background.

The result of this research showed that there wasn't significant difference perception about the benefit of audit committee for company among the respondent based on level management.

Keywords : Good Corporate Governance, Audit Committee, Management, Perception.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim...

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala karunia, rahmat dan nikmatNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Persepsi Manajemen Perbankan Mengenai Manfaat Dan Fungsi Komite Audit Dalam Mewujudkan Tata Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*); (Untuk Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Atau Bursa Efek Surabaya Dan Memiliki Kantor Cabang Di Jember)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. Penulis yakin, tanpa hidayah dan pertolonganNya manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa di dunia ini.

Penulis mengangkat masalah ini, dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang memahami apakah komite audit dan apa fungsinya bagi perusahaan yang telah *go public*. Para akademisi sendiri jarang yang mengetahui apa dan bagaimana komite audit yang merupakan elemen penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

Fenomena inilah yang menarik penulis untuk menjadikannya sebagai skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Sarwedi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Drs. Imam Mas'ud Ak, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Dra. Yosefa Sayekti, Ak, M.Com selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan, masukan, serta arahan kepada penulis.
4. Dra. Ririn Irmadariyani, Ak, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik dan ide dalam penulisan skripsi ini.

5. Rochman Effendi SE, Ak., MSi. selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan memberi masukan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
7. Pimpinan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dan memiliki kantor cabang di Jember beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu pelaksanaan penelitian skripsi ini.
8. Mbak Nuk, Pak Dwijo Djarinto dan Aditya, makasih atas semua support selama penulis menjalani masa perkuliahan.
9. Kawan-kawan terbaikku, "*Akuntansi '00*"... Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. Makasih atas kenangan2 yang diberikan pada penulis dan semoga kalian mendapatkan masa depan yang cemerlang.
10. Keluarga besar "*Tanjung Limo*" tercinta, *Mbak Ephink, Mida, Erwin, Denok, Yessi, Eni Entionk*, (makasih pinjaman buku2ne), dan semuanya penghuninya.
11. Almamaterku tercinta, "*UNIVERSITAS JEMBER*".
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, semangat serta dorongannya mendapat balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warohimatullohi Wabarokatuli.

Jember, April 2005

Penulis

2.2.2.5 Laporan Komite Audit.....	17
2.3 Hipotesis.....	19

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	20
3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian.....	21
3.3 Instrumen Penelitian.....	23
3.4 Uji Normalitas Data	25
3.4.1 Uji Validitas	25
3.4.2 Uji Reliabilitas	26
3.4.3 Uji Normalitas Data	28
3.5 Metode Analisis Data	28
3.6 Analisis Deskriptif	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	29

IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Perbankan.....	30
4.2 Demografi Responden.....	38
4.3 Hasil Uji Kualitas Data	41
4.3.1 Uji Validitas	41
4.3.2 Uji Reliabilitas	43
4.3.3 Uji Normalitas Data	44
4.4 Analisis Data dan Pembahasan.....	45

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Keterbatasan penelitian.....	52
5.3 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Proses Berdirinya Bank Danamon 37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Rekapitulasi Jawaban Responden

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas

Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas

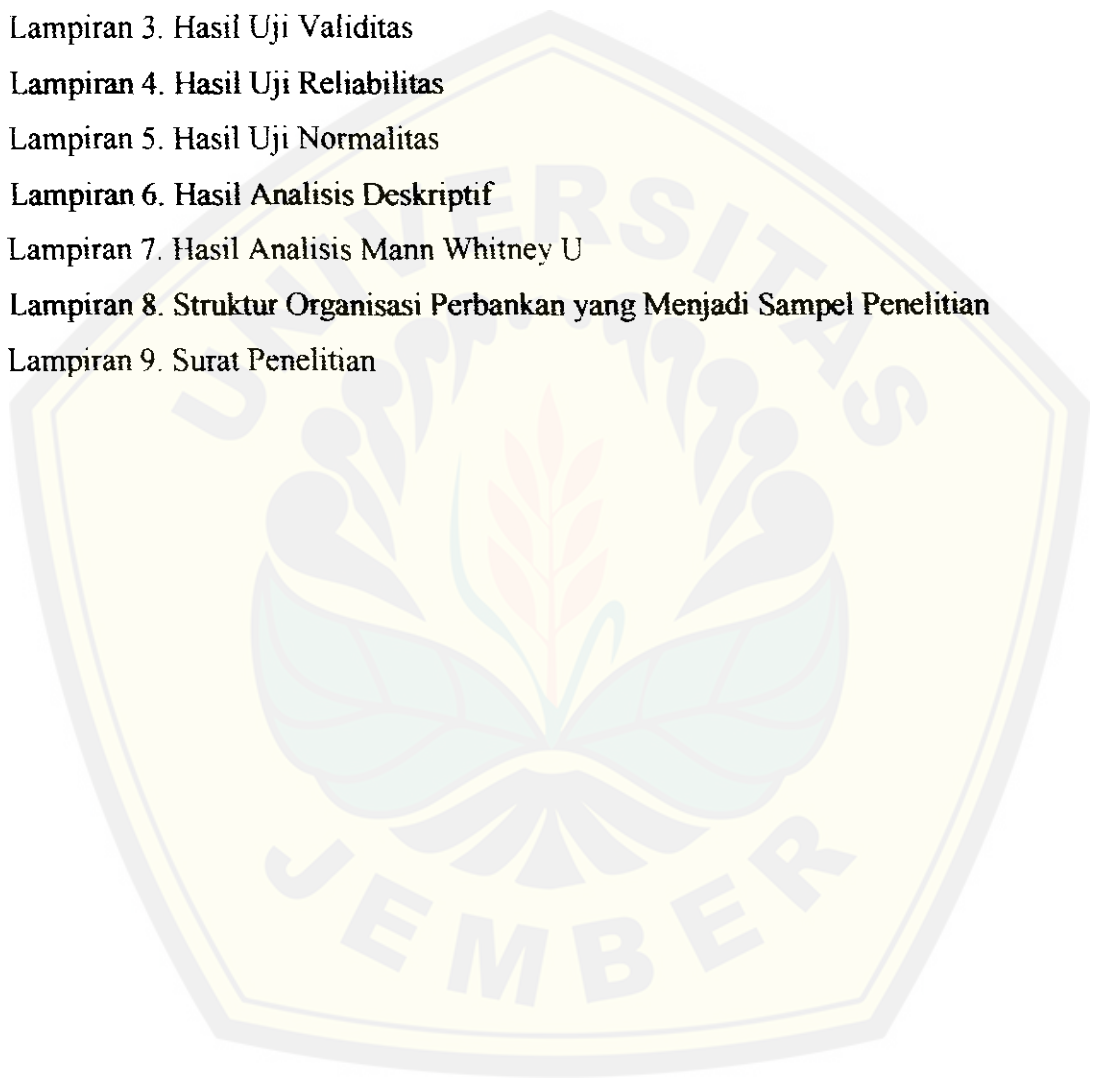
Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas

Lampiran 6. Hasil Analisis Deskriptif

Lampiran 7. Hasil Analisis Mann Whitney U

Lampiran 8. Struktur Organisasi Perbankan yang Menjadi Sampel Penelitian

Lampiran 9. Surat Penelitian





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Gagasan *Corporate Governance* muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku bisnis yang dilaksanakan perusahaan. Naiknya nilai saham, praktek bisnis yang sehat, dipenuhi pasokan barang dan perhatian terhadap pelanggan, produk-produk berkualitas, hak-hak pekerja dan standar upah buruh, isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan bagian dari lingkungan perusahaan yang harus diperhatikan manajemen. Tuntutan dan kontrol dari berbagai pihak inilah yang mendorong perusahaan harus menerapkan *Good Corporate Governance* (IICG: *Frequently Asked and Question*, 2000).

Pada konsep *Good Corporate Governance* terdapat prinsip-prinsip dasar yang meliputi: *fairness*, *responsibility*, *accountability*, dan *transparency* (Syakhroza, 2003). Prinsip-prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan saja kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah saja, akan tetapi juga kepada *stakeholders* lainnya, seperti masyarakat umum dan karyawan. Laporan ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Laporan yang diberikan perusahaan menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai oleh perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan nilai tambah kepada *stakeholders*.

Laporan keuangan tersebut merupakan sumber informasi yang digunakan berbagai pihak untuk menilai kinerja perusahaan. Namun di sisi lain, laporan keuangan juga merupakan celah yang dapat digunakan untuk menyembunyikan informasi tentang perusahaan yang harus dilaporkan kepada *stakeholders*. Oleh karena itu, diperlukan laporan keuangan yang dapat menjadi sumber informasi serta memiliki kredibilitas di mata publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung independensi dan akuntabilitas fungsi audit di mata *stakeholders*.

Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan prinsip *good corporate governance*. Keberadaan komite audit ini, merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Komite audit juga berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektivitas dari auditor.

Berbagai manfaat potensial dari keberadaan komite audit dalam perusahaan tersebut mengakibatkan banyaknya perhatian yang diberikan untuk pembentukan komite audit. Perhatian terhadap penerapan fungsi komite audit diwujudkan baik dalam bentuk peraturan maupun berbagai penelitian yang berguna sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas komite audit.

Kebijakan pembentukan komite audit pada perusahaan *go public* di Indonesia telah direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) melalui Surat Edaran No.SE.03/PM/2000, yang diterbitkan tanggal 5 Mei 2000 (Tugiman, 1995). Dengan tujuan yang sama, Dewan Direksi Bursa Efek Jakarta merespon positif dengan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06/2000 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2000, pada butir C-1 surat keputusan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan atau *corporate secretary* (Tugiman, 1995).

Namun, berbagai kebijakan ini dalam kenyataannya masih menimbulkan sikap pro dan kontra antar perusahaan *go public* (emiten) sendiri, karena masing-masing emiten memiliki pendapat dan sudut pandang pemikiran yang berbeda. Di samping itu, emiten belum memahami sepenuhnya fungsi komite audit yang direkomendasikan Bapepam. Sehingga masih banyak perusahaan yang meragukan manfaat serta fungsi komite audit dalam mewujudkan kinerja manajemennya. Dalam sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia disebutkan tentang kegagalan penerapan Dewan Audit pada sektor perbankan (Media

Akuntansi, 2000). Berdasarkan hal itu, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui konsistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2002) mengenai tingkat pemahaman para manajemen perbankan terhadap konsep *good corporate governance* dan komite audit serta persepsi manajemen terhadap manfaat dan fungsi komite audit.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan persepsi manajemen mengenai manfaat dan fungsi komite audit dalam mewujudkan *good corporate governance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta memiliki kantor cabang di Jember.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi manajemen mengenai manfaat dan fungsi komite audit dalam mewujudkan tata pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta memiliki kantor cabang di Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, menjadi masukan dan bahan perbandingan untuk kajian-kajian selanjutnya.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk memperdalam kemampuan teoritis dan menambah wawasan di bidang pasar modal. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan akademisi mengenai manfaat dan fungsi komite audit dalam

perbankan, karena berdasarkan pengetahuan penulis, kalangan akademisi khususnya mahasiswa kurang memahami mengenai komite audit itu sendiri.

3. Bagi manajer perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan karena dapat menambah pengetahuan para responden khususnya dan karyawan pada umumnya mengenai manfaat dan fungsi komite audit dan bahan perbandingan untuk kajian mengenai manfaat dan fungsi komite audit pada sektor perbankan.





II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hingga saat ini, keberadaan komite audit masih menjadi perdebatan berbagai pihak. Posisi komite audit dalam perusahaan dapat dikatakan berada pada “daerah abu-abu”, karena menghubungkan manajemen dengan dewan komisaris (Tugiman, 1995). Hal inilah yang mendorong dilakukannya berbagai penelitian yang berkaitan dengan keberadaan komite audit. Penelitian-penelitian tersebut antara lain dilakukan Jaiyos (1999) dalam Media Akuntansi (2000) yang melaporkan hasil survei tentang komite audit di Thailand. Dari survei yang dilakukan Jaiyos tersebut diketahui sebanyak 44% responden menjawab bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengembangkan *corporate governance* adalah dengan membentuk komite audit. Sedangkan 87% responden menyetujui akan adanya peraturan tentang pembentukan komite audit yang dikeluarkan oleh *The Stock Exchange of Thailand* (SET). Pada tahun 1999 juga, *New York Stock Exchange* (NYSE) dan *The National Association of Securities Dealers* (NASD) melalui *Blue Ribbon Committee* menerbitkan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja komite audit pada perusahaan yang terdaftar di NYSE khususnya dan semua perusahaan pada umumnya. Secara ringkas rekomendasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Herwidayatmo, 2000) :

1. Perusahaan yang terdaftar di bursa membentuk “direktur independen”.
2. Perusahaan yang terdaftar di bursa mempunyai komite audit yang terdiri atas “direktur independen”.
3. Perusahaan yang terdaftar di bursa mempunyai komite audit minimal tiga orang yang memiliki tingkat kemampuan dan keahlian yang memadai di bidang keuangan (*financial literacy* dan *financial expertise*).
4. Perusahaan yang terdaftar di bursa membentuk pedoman dasar (*charter*) yang tertulis yang ditinjau setiap tahun.

5. Perusahaan mengungkapkan apakah mereka mempunyai program kerja audit komite dan apakah mereka telah menjalankan program tersebut.
6. Anggaran dasar komite audit menetapkan bahwa auditor eksternal bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan komite audit.
7. Komite audit mengumpulkan informasi dari auditor eksternal dan mengambil tindakan untuk memastikan independensi auditor eksternal.
8. Komite audit mengadakan diskusi dengan auditor eksternal tentang kualitas prinsip-prinsip akuntansi perusahaan.
9. Komite audit mengungkapkan aktivitas komite audit dan meyakini bahwa laporan keuangan perusahaan telah diungkapkan secara wajar (*fair*).
10. Komite audit membahas sifat *review* keuangan interim dengan auditor untuk memastikan bahwa laporan interim perusahaan tersebut telah konsisten dengan laporan tahunan serta dapat merefleksikan tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan.

Penelitian lain yang berhubungan dengan komite audit dilakukan oleh Jones (1986) dalam artikel Sulistyanto (2003). Dalam penelitiannya, Jones menguji preferensi yang signifikan dari pemegang saham terhadap 78 perusahaan yang tercatat di NYSE dengan hasil yang menyebutkan tidak ada perbedaan antara perusahaan yang memiliki komite audit dengan yang tidak memilikinya. Hasil penelitian Jones tersebut berbeda dengan yang ditemukan oleh McMullen (1996) dalam Hidayati (2000) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif pada perusahaan yang memiliki komite audit yaitu dengan relatif sedikitnya: (1) gugatan pemegang saham terhadap suatu kecurangan, (2) koreksi terhadap laporan keuangan, (3) penindakan hukum oleh *Stock Exchange Commission* (SEC), (4) pelanggaran hukum, dan (5) penggantian auditor eksternal jika terjadi ketidaksepakatan dengan klien. Dalam penelitian McMullen tersebut tidak disebutkan jumlah sampel dan tempat dilakukannya penelitian.

Berdasarkan penelitian McMullen tersebut, maka pada tahun 2002 Indriyani melakukan penelitian mengenai manfaat dan fungsi komite audit dalam mewujudkan tata pengelolaan perusahaan yang baik. Penelitian ini bersifat *exploratory research* karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

manfaat dan fungsi komite audit pada perusahaan *go public* di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, sampel penelitian yang diambil adalah manajemen perusahaan *go public* di Bursa Efek Jakarta. Dari penelitian yang dilakukan tersebut, Indriyani menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai manfaat komite audit dari manajemen perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Perbedaan persepsi secara signifikan lebih ditunjukkan dengan klasifikasi berdasarkan lama perusahaan *go public*. Data penelitian didapatkan dengan metode survei, yaitu menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara, pada penelitian tersebut tidak mengajukan hipotesis.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengacu pada penelitian Indriyani (2002) yang mengacu pada McMullen (1996). Tetapi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi hasil penelitian Indriyani jika populasi yang diambil adalah perbankan *go public* dan memiliki kantor cabang di Jember.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. *Good Corporate Governance*

Pengertian pengelolaan perusahaan (*Corporate Governance*) antara lain diungkapkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2001), yaitu :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

OECD (2001) juga mengungkapkan bahwa dalam prinsip *Corporate Governance* terdapat empat unsur penting, yaitu:

1. Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor (keadilan *fairness*).

2. Mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan (*transparansi/transparency*).
3. Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris (*akuntabilitas/accountability*).
4. Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial (*pertanggungjawaban/responsibility*).

Senada dengan pernyataan dari OECD di atas, *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG, 2000) mengungkapkan bahwa penerapan *corporate governance* ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional dan internasional.
2. Memenuhi tuntutan standar global.
3. Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang oleh pengelola.
4. Meminimalkan *cost of capital* dengan menekan risiko yang dihadapi kreditor.
5. Meningkatkan nilai saham perusahaan.
6. Mengangkat citra perusahaan.

Corporate Governance sebagai sebuah sistem di mana perusahaan dikelola dan dikendalikan memerlukan beberapa elemen yang menentukan efektivitas pelaksanaannya. Elemen-elemen ini meliputi: lingkungan manajemen, kepemimpinan, manajemen risiko, akuntabilitas dan sistem komunikasi. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dalam perusahaan akan memberikan berbagai manfaat yaitu (Media Akuntansi, 2000):

1. Entitas bisnis akan menjadi efisien.
2. Meningkatkan kepercayaan publik.
3. Menjaga *going concern* perusahaan.
4. Dapat mengukur target kerja manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan produktivitas.
6. Mengurangi distorsi (*management risk*).

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Melvill (Media Akuntansi, 2000), yaitu ada beberapa keuntungan dari penerapan *good corporate governance*, antara lain mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan dalam upaya *listing*, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan akuntabilitas sosial yang akan terungkap secara jelas.

Good Corporate Governance berkaitan pula dengan pengambilan keputusan yang efektif dan bersumber dari budaya perusahaan, etika nilai sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. (Hasan, 2000)

2.2.2 Komite Audit

2.2.2.1 Fungsi Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Arens dan Loebbecke, 1994). Dalam lampiran Surat Keputusan Dewan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06/2000 poin 2f disebutkan bahwa:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat” (BEJ, 2000).

Said, et.al (Media Akuntansi, 2000) mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pembentukan komite audit dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan obyektivitas dewan komisaris dan dewan direksi. Lebih dari itu, komite audit banyak memberikan manfaat lain bagi perusahaan yaitu:

- 1) Memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.

2. Memungkinkan dewan komisaris untuk memberikan penilaian yang independen atas kinerja keuangan perusahaan.
3. Memperkuat posisi auditor eksternal dalam memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Memperkuat independensi dan obyektivitas auditor internal.
5. Meningkatkan keyakinan publik, khususnya investor, terhadap perusahaan.
6. Mengurangi peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan.

Fungsi utama keberadaan komite audit dalam perusahaan adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab untuk *review* informasi keuangan yang disediakan bagi para pemegang saham maupun pihak lain, menilai sistem pengendalian internal serta proses audit eksternal. Berkaitan dengan fungsi komite audit tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu (Conference On Corporate Governance In Asia, 1999):

1. Komite audit ditugaskan dan disetujui oleh dewan komisaris. Fungsinya harus sesuai dengan ukuran bisnis, kompleksitas bisnis, jenis industri dan struktur organisasi.
2. Fungsi komite audit dinyatakan secara jelas dalam *term of reference* dan diungkapkan kepada seluruh pemegang saham.
3. Fungsi komite audit di *review* dan di *up-date* secara berkala.
4. Komite audit harus melaporkan setiap perubahan fungsi komite audit.
5. Komite audit memiliki lingkup aktivitas antara lain:
 - a. Meninjau kecukupan, kredibilitas dan obyektifitas laporan keuangan dengan berkoordinasi dengan auditor eksternal, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan baik secara kuartal maupun tahunan.
 - b. Meninjau kesesuaian dan efektifitas struktur pengendalian internal perusahaan dan fungsi audit internal.
 - c. Meninjau kepatuhan perusahaan terhadap segala undang-undang yang berlaku.

- d. Memberikan saran dan pertimbangan untuk menentukan auditor eksternal termasuk dalam menentukan *audit fee* berdasarkan kemampuan profesional auditor eksternal tersebut.
- e. Menilai kesesuaian semua transaksi yang berhubungan atau pengungkapan dari permasalahan kepentingan.
- f. Melaksanakan penugasan-penugasan lain yang telah ditetapkan.
- g. Komite audit memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi yang berasal dari saran-saran profesional independen.
- h. Melaporkan aktifitas komite audit dalam laporan tahunan perusahaan dan harus disetujui oleh ketua komite audit. Laporan aktifitas komite audit tersebut harus berisi informasi tentang:
 - (1) Pendapat atas proses pelaporan keuangan perusahaan dan pengungkapan informasi keuangan yang harus benar, lengkap dan kredibel.
 - (2) Pendapat tentang kecukupan struktur pengendalian intern perusahaan.
 - (3) Pernyataan akan kesesuaian auditor perusahaan yang akan ditunjuk kembali.
 - (4) Pendapat atas kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang yang berlaku.
 - (5) Informasi lain yang kemungkinan akan menjadi bahan pertimbangan pemegang saham maupun investor secara umum.

Adapun fungsi-fungsi dari komite audit tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini (Tugiman, 1995):

1. Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan dari komite audit meliputi kegiatan yang bertujuan untuk: *pertama*, menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin obyektifitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan; *kedua*, menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi; *ketiga*, menelaah efektifitas struktur

pengendalian internal dan memastikan tingkat kepatuhan struktur pengendalian internal tersebut; *keempat*, mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan ataupun kecurangan; *kelima*, menelaah seluruh transaksi yang signifikan, khususnya transaksi non rutin dan yang kemungkinannya ilegal, menimbulkan pertanyaan dan kurang etis; sedangkan tujuan akhir dari fungsi komite audit ini adalah menilai estimasi, kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai pengaruh internal material terhadap laporan keuangan.

2. Fungsi Auditor dan Pengauditan

Fungsi komite audit yang termasuk dalam fungsi auditor dan pengauditan meliputi: merekomendasikan kesepakatan dan besarnya *fee* untuk auditor eksternal, menelaah perencanaan dan efektifitas audit internal dan eksternal, menelaah pembagian dan koordinasi tugas antara auditor internal dengan auditor eksternal, menelaah surat perintah kerja manajemen kepada auditor eksternal.

Menentukan bahwa auditor bebas dari pembatasan, campur tangan, dan pengaruh manajemen, meminta penjelasan jika terjadi perselisihan antara auditor eksternal dengan manajemen, memonitor sumber-sumber yang dialokasikan untuk menjalankan fungsi auditor internal, dan menelaah sifat dan besarnya pembayaran *fee* auditor untuk jasa *non-audit* juga merupakan fungsi auditor dan pengauditan.

3. Fungsi Organisasi Perusahaan

Fungsi komite audit dalam aspek organisasi dapat disebutkan antara lain adalah memfasilitasi dan sebagai media komunikasi antara auditor eksternal dengan dewan direksi, menelaah kebijakan dan praktik perusahaan dipandang dari sudut pertimbangan etik, dan memonitor pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan aplikasi dan kesesuaiannya dengan peraturan perusahaan yang diterapkan.

2.2.2.2 Tanggung Jawab Komite Audit

Tanggung jawab komite audit antara lain: bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaporan keuangan perusahaan, sistem pengendalian perusahaan dan atas pengelolaan perusahaan (*corporate governance*). Tanggung

jawab komite audit berkenaan dengan pelaporan keuangan adalah memastikan bahwa pengungkapan keuangan yang dibuat oleh manajemen adalah relevan dengan kondisi keuangan perusahaan, merupakan hasil dari operasi perusahaan serta kesesuaian dengan komitmen jangka panjang perusahaan (Tunggal, 2003).

Dalam area pengendalian internal, komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengendalian internal dirancang untuk menjaga kekayaan perusahaan serta meyakinkan bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat. Sedangkan dalam pengelolaan perusahaan, komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sesuai dengan etika yang akan mengendalikan adanya konflik kepentingan antar karyawan serta mencegah terjadinya kecurangan.

2.2.2.3 Komposisi dan Kualifikasi Komite Audit

Pada umumnya, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota yang merupakan pihak independen (IICG, 2000). Jumlah anggota komite audit ini pada dasarnya dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan berkaitan dengan ukuran perusahaan serta fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan kepada komite audit. Berkaitan dengan masalah ini terdapat beberapa hal yang merupakan ciri-ciri dari komite audit menurut Sheridan dan Kendall dalam Media Akuntansi (2000) adalah :

1. Mereka adalah komite-komite dari majelis penyelia dan bertanggung jawab terhadapnya.
2. Pekerjaan mereka adalah meninjau laporan keuangan dan keefektifan kontrol internal, termasuk kontrol terhadap operasional perbendaharaan.
3. Mereka dapat memiliki pengaruh penting pada penyajian laporan keuangan kepada dunia luar dan memastikan adanya pelaporan yang berkualitas.
4. Mereka dapat memperoleh pokok informasi apapun yang mereka butuhkan dari bagian manapun dalam perusahaan.
5. Jumlah rapat yang diadakan selama setahun beragam menurut keadaan.
6. Komite ini melapor kepada majelis penyelia.

Komite audit memegang peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham serta menyeimbangkan hubungan auditor dengan manajemen. Namun demikian, Kirk (Media Akuntansi, 2000) mengungkapkan bahwa komite audit tidak akan berfungsi secara efektif tanpa memiliki anggota yang kompeten, dan aktif. Efektifitas komite audit juga ditentukan oleh kejelasan tentang komposisi, kualifikasi, tugas, maupun fungsi dan tanggung jawabnya.

Secara kualitatif, hal yang paling penting bagi anggota komite audit dalam melaksanakan fungsi komite adalah sifat independensinya. Independensi merupakan elemen kritis yang akan menentukan terlaksananya keseluruhan peran komite audit secara obyektif serta pencapaian manajemen yang akuntabel bagi para pemegang saham (Baridwan, 2002).

Beberapa penelitian sebelumnya, menemukan bahwa dengan tingkat independensi yang tinggi akan memberikan dua manfaat yang penting, yaitu tingkat pengawasan yang tinggi dan rendahnya tingkat kecurangan laporan keuangan NYSE (Conference On Corporate Governance In Asia, 1999). Di samping itu, independensi komite audit pun harus didukung dengan kemampuan lain, yang akan bermanfaat dalam proses pelaksanaan fungsi komite audit. Hal ini mendukung apa yang diungkapkan oleh Said et. al. (Media Akuntansi, 2000) bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keanggotaan komite audit, yaitu:

1. Independensi, untuk menjaga agar komite audit tetap independen terhadap manajemen dan memiliki kredibilitas di mata publik dan pemegang saham.
2. Kompetensi, yaitu berhubungan dengan adanya pemahaman yang memadai yang harus dimiliki oleh anggota komite audit termasuk atribut-atribut yang mendukung pelaksanaan tugasnya, yaitu sifat tidak mudah percaya (*suspicious mind*), memiliki rasa ingin tahu (*inquisite mind*), dapat berpikir logis (*logical mind*), dan memiliki kemampuan analisis (*analitical ability*).
3. Komitmen, yaitu kesadaran akan tanggung jawab legal dan profesional mereka sama dengan manajer yang akan mengelola tugas-tugas eksekutif dalam perusahaan.

4. Kompensasi, bahwa tiap anggota komite audit harus didukung dengan kompensasi yang memadai untuk menjaga independensi, obyektifitas dan mutu pekerjaan mereka.

2.2.2.4. Tugas dan Wewenang Komite Audit

Dalam pelaksanaan aktivitasnya, komite audit harus berdasarkan pada tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas komite audit menurut Tugiman (1995) dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

1. Terhadap proses pemeriksaan yang merupakan tanggung jawab tertinggi dari komite audit;
2. Terhadap laporan keuangan;
3. Terhadap masalah keuangan dan pembelanjaan;
4. Terhadap sistem informasi manajemen; dan
5. Terhadap sistem dan pengendalian.

Tugas komite audit dalam proses pemeriksaan yang merupakan tugas utamanya, meliputi: meyakinkan *stakeholders* bahwa semua temuan atau rekomendasi dari auditor telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh manajemen dengan persetujuan atau pemberitahuan kepada auditor, melakukan kajian dan pengujian bersama-sama dengan auditor terhadap hasil pemeriksaan, melakukan kajian terhadap audit program dari auditor eksternal, membahas ruang lingkup pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan auditor, dan yang terakhir melakukan kajian atas efektifitas dari auditor eksternal. Sementara itu, terdapat wewenang dan tanggung jawab dari komite audit kepada auditor internal, yaitu: melakukan kajian terhadap program kerja dan fungsi internal audit, melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan fungsi internal audit, melakukan penyelidikan seperlunya di bawah kewenangan kepala audit internal bagi semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan komite audit, serta melakukan kajian dan pengujian terhadap perencanaan dan mengadakan koordinasi antara auditor eksternal dengan auditor internal untuk memberikan pelayanan yang efektif.

Tugas kedua komite audit terhadap laporan keuangan yaitu, melihat dan mengamati pembuatan laporan tahunan gabungan dan akun-akun terkait serta memberikan rekomendasi yang diperlukan, melakukan kajian tengah tahunan dan tahunan terhadap ikhtisar keuangan termasuk juga prospektus perusahaan sebelum diserahkan kepada dewan komisaris dan sebagai persetujuan.

Dalam melaksanakan tugasnya komite audit juga mengadakan diskusi dengan auditor (baik internal maupun eksternal) dan manajemen tentang dasar atau kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan, kebijaksanaan dan aplikasinya dalam menyiapkan akun, termasuk kejadian yang luar biasa yang sekiranya akan menjadi pertanyaan pada akhir tahun serta menyajikan angka yang sebenarnya, ikhtisar keuangan disertai dengan sejumlah perincian yang diperlukan secara lengkap, serta mengadakan kajian terhadap segala kemungkinan yang ditimbulkan dari perubahan perlakuan akuntansi di masa yang akan datang.

Tugas komite audit yang terkait dengan masalah keuangan dan pembelanjaan, yaitu melakukan kajian terhadap posisi keuangan gabungan dengan referensi anggaran kas, dividen yang mungkin diterima atau dibayarkan dan laba yang diinginkan, tanggap terhadap proposal dari pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan: (1) target keuangan termasuk target tahunan, (2) mengadakan pertemuan dengan kelompok penyandang dana dan memberikan metode alternatif dalam pemilihan mitra penyandang dana, (3) mengadakan analisa terhadap batas pembelanjaan modal dalam satu tahun termasuk di dalamnya pengalokasian sumber-sumber permodalan dan bisnis.

Selain tugas yang telah disebutkan di atas, masih terdapat tugas untuk membuat catatan terhadap proposal khususnya untuk kegiatan pembelanjaan atas jumlah tertentu dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris yang berhubungan dengan: (1) pembelanjaan modal yang lebih dari jumlah tertentu jika termasuk dalam anggaran, (2) pembelanjaan modal lebih dari jumlah tertentu jika tidak termasuk dalam anggaran. Selain itu, komite audit haruslah melakukan kajian terhadap proses pekerjaan untuk kontrak yang nilainya lebih dari jumlah tertentu, dan melakukan kajian terhadap dasar disetujuinya investasi yang tidak ada dalam program.

Tugas komite audit meyakini akan kebenaran dari sistem informasi manajemen yang dihasilkan oleh perusahaan dan bertindak sebagai *standing committee* dari dewan komisaris apabila dewan komisaris memberikan hal-hal yang positif tentang kelayakan laporan keuangan dengan obyek perusahaan merupakan tugas yang terkait dengan sistem informasi manajemen perusahaan yang bersangkutan.

Sistem dan pengendalian juga berpengaruh terhadap tugas yang harus diemban oleh sebuah komite audit, antara lain melakukan kajian terhadap efektifitas dari pengendalian manajemen, melakukan kajian terhadap sistem pengendalian intern, melakukan kajian dan pengujian yang memadai terhadap sistem audit dan pengendalian operasi.

Pengawasan dan koordinasi terhadap kebijaksanaan pengendalian gabungan sehubungan dengan sistem komunikasi, tanggap terhadap rekomendasi yang diberikan oleh audit eksternal khususnya berkenaan dengan akun, pengendalian intern, dan masalah lainnya, dan penggunaan audit internal untuk menguji dan melaporkan setiap aktivitas, prosedur atau sistem pada waktu tertentu dan di lain waktu pada tahun-tahun berikutnya juga merupakan salah satu tugas komite audit dalam hal yang terkait dengan sistem dan pengendalian perusahaan yang bersangkutan. Pada akhirnya, komite audit juga melakukan pengawasan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan dengan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam penganggaran, perintah dan prosedur, termasuk dalam hal ini yang berhubungan dengan perilaku dan sikap para pejabat atau personil perusahaan.

2.2.2.5 Laporan Komite Audit

Untuk selanjutnya, komite audit juga bertanggung jawab untuk melaporkan aktivitas yang dilakukannya. Laporan dari komite audit ini diperlukan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan, misalnya pemegang saham serta investor. Sebagaimana diungkapkan dalam SET (Conference On Corporate Governance In Asia, 1999), bahwa laporan dari komite

audit tersebut antara lain ditujukan kepada: Dewan Komisaris, Badan Pembuat Perundangan (*Regulatory Entities*), pemegang saham dan investor.

Laporan kepada Dewan Komisaris berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Kinerja dan operasi komite audit, yang berisi informasi:
 - a. Bahwa komite audit telah memberikan berbagai rekomendasi atas permasalahan yang bersifat materiil.
 - b. Laporan dari aktifitas dan hasil kerja komite audit pada tahun atau periode tersebut.
 - c. Pendapat akan laporan keuangan perusahaan serta program dan kerja dari auditor internal.
 - d. Informasi lain yang mungkin diperlukan oleh dewan komisaris.
2. Laporan atas permasalahan yang material dan memerlukan pemecahan secepatnya dari dewan komisaris, yaitu:
 - a. Transaksi-transaksi yang menimbulkan konflik kepentingan.
 - b. Hasil temuan atas kecurangan maupun kegagalan dari sistem pengendalian internal.
 - c. Hasil temuan permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan peraturan yang berlaku.
 - d. Informasi lain yang diperlukan oleh dewan komisaris.

Laporan kepada Badan Pembuat Undang-Undang (*Regulatory Entities*), dilakukan apabila terdapat permasalahan penting yang dapat mengganggu status keuangan perusahaan dan hasil operasi serta telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris maupun manajemen, akan tetapi komite audit memandang bahwa pemecahan yang dihasilkan belum memuaskan. Laporan yang diberikan kepada pemegang saham dan investor memuat informasi-informasi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Laporan ini harus mendapat persetujuan dari komite audit terlebih dahulu.

2.3 Hipotesis

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa di Jember tingkatan manajerial perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya belum banyak yang paham mengenai komite audit dalam mewujudkan tata pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam hal ini, yang dimaksud manajemen tingkat atas adalah kepala cabang dan kepala divisi perbankan sedangkan yang masuk dalam kriteria manajemen tingkat menengah adalah kepala bagian perbankan yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya dan memiliki Kantor Cabang di Jember.

H_1 : Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya dan memiliki Kantor Cabang di Jember.

III. METODE PENELITIAN



3.1 Metode Penelitian

Jika ditinjau dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan replika dari penelitian Indriyani (2002) yang bersifat *exploratory research* dan tidak mengajukan hipotesis. Pada penelitian Indriyani, hipotesis sulit dibuat karena tidak ada dasar yang kuat untuk persoalan yang diteliti ini yang sifatnya relatif baru. Hal ini berarti bahwa belum banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti masalah ini. Desain riset tersebut berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru sehingga dapat dikatakan bahwa riset yang dilakukan penulis bertolak pada variabel bukan fakta. Hal ini dapat diartikan demikian, bahwa penelitian yang dilakukan tersebut dilaksanakan berdasarkan variabel-variabel yang disusun Indriyani. Penelitian bukan berdasarkan fakta maksudnya adalah penelitian dilakukan untuk mencari ide-ide baru mengenai manfaat dan fungsi komite audit dan bukan melakukan penelitian dengan kenyataan bahwa manfaat dan fungsi komite audit tidak dapat digambarkan dalam suatu bentuk tetapi lebih kepada ide dan hubungan baru yang terjadi. Desain *exploratory research* dianggap sebagai langkah pertama yang diharapkan dapat dipakai untuk merumuskan persoalan dimana pemecahannya dapat memakai jenis riset yang lain.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengetahui konsistensi hasil penelitian terdahulu dengan lebih memfokuskan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada sektor perbankan. Untuk mempermudah penelitian, penulis hanya mengambil obyek penelitian pada bank-bank yang telah terdaftar di bursa dan memiliki kantor cabang di Jember.

Dari segi permasalahannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang difokuskan pada penelitian opini (*opinion research*). Penelitian opini adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki pandangan, persepsi, atau penilaian responden terhadap masalah tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sedangkan

obyek dalam penelitian adalah manfaat dan fungsi komite audit dalam perusahaan *go public* dalam rangka mewujudkan tata pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah manajemen perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya dan sampel penelitian adalah manajerial tingkat atas dan tingkat menengah dari perbankan *go public* dan memiliki kantor cabang di Jember. Pengambilan sampel didasarkan pada kriteria sampel (Indriantoro dan Supomo, 2002) :

1. Akurasi

Sampel yang akurat adalah sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi parameter populasi dengan tepat. Akurasi berkaitan dengan tingkat keyakinan (*confidence level*). Semakin akurat suatu sampel akan semakin tinggi tingkat keyakinan bahwa statistik sampel mengestimasi parameter populasi dengan tepat. Tingkat keyakinan dalam statistik dinyatakan dengan persentase.

2. Presisi

Sampel yang presisi adalah sejauh mana hasil penelitian berdasarkan sampel dapat merefleksikan realitas populasinya dengan teliti. Presisi menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel menggambarkan karakteristik populasinya. Presisi umumnya dinyatakan dengan interval keyakinan (*confidence interval*) dari sampel yang dipilih.

Untuk memenuhi pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka subyek penelitian yang dipilih memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan manajemen dari perbankan yang terdaftar di bursa efek, baik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau Bursa Efek Surabaya (BES).
2. Merupakan manajemen perbankan yang terdaftar di bursa dan memiliki kantor cabang di Jember.

3. Merupakan manajemen yang termasuk dalam manajemen tingkat menengah (*middle management*) di sini yang dimaksud adalah kepala-kepala bagian dan manajemen tingkat atas (*top management*) dalam hal ini adalah kepala-kepala divisi dan kepala cabang.

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan metode survei dengan kuesioner yang didistribusikan secara langsung. Jumlah kuesioner yang didistribusikan pada awal penelitian adalah 50 eksemplar untuk 10 bank *go public* dan memiliki Kantor Cabang di Jember, yaitu : Bank Central Asia (BCA), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Lippo, Bank Buana, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia (BII), dan Bank Niaga). Tetapi dari 10 bank tersebut yang bisa menerima penelitian ini hanya lima bank, jadi jumlah kuesioner yang disebar hanya 25 kuesioner.

Rumus yang digunakan penulis untuk menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut (Singarimbun dan Effendi, 1995):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi
- e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir/diinginkan, dalam hal ini e yang dipakai penulis adalah 2 %.

Menurut Singarimbun (1985) dalam Purwanto (2000), sampel minimum penelitian adalah 10% dari jumlah populasi, meskipun ada beberapa peneliti yang menetapkan batas minimal sampel 5% dari populasi.

Dalam penelitian ini populasinya adalah 63, karena dalam setiap perusahaan tingkatan manajerialnya berbeda-beda tergantung dari besar kecilnya

perbankan. Adapun sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 18, ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{63}{1 + 63(0,2)^2}$$
$$n = 18$$

Penyebaran kuesioner dengan jumlah 25 ini dilakukan oleh penulis dengan pertimbangan bahwa terdapat kuesioner yang tidak kembali ataupun kembali dengan jawaban yang tidak lengkap.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah kuesioner dan berisi daftar pertanyaan yang terbagi dalam tiga bagian. Kuesioner tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bagian pertama kuesioner berupa pertanyaan tentang data pribadi responden. Bagian kedua merupakan pertanyaan tentang perusahaan. Sedangkan bagian ketiga ini berisi daftar pernyataan tentang pendapat responden berkaitan dengan manfaat dan fungsi komite audit. Pada bagian terakhir ini, responden diminta untuk mengungkapkan persepsinya atas pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner untuk mengetahui tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan tersebut (Indriyani, 2002).

Butir-butir pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis merupakan pernyataan yang disusun Indriyani (2002) dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan konsep *good corporate governance* pada umumnya dan khususnya tentang komite audit. Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Skala pengukuran yang digunakan dalam menyusun pernyataan ini adalah skala ordinal. Pendapat terhadap pernyataan tersebut diberi skor sesuai dengan pendapatnya, yaitu (Riduwan, 2002):

- | | | | |
|----------|---|---------------------|--------|
| 1. "SS" | = | Sangat Setuju | skor 5 |
| 2. "S" | = | Setuju | skor 4 |
| 3. "TT" | = | Tidak Tahu | skor 3 |
| 4. "TS" | = | Tidak Setuju | skor 2 |
| 5. "STS" | = | Sangat Tidak Setuju | skor 1 |

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator
A.	Pemahaman terhadap konsep komite audit (X₁)	1) Pemahaman terhadap konsep <i>good corporate governance</i> . 2) Pemahaman terhadap isi dari Indonesian <i>Code of Corporate Governance (ICCG)</i> . 3) Pemahaman terhadap tugas dan wewenang komite audit. 4) Pemahaman terhadap posisi komite audit dalam pengelolaan perusahaan. 5) Kesadaran untuk meng- <i>up date</i> wawasan tentang peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. 6) Dukungan terhadap penerapan fungsi komite audit dalam perusahaan. 7) Kaitan antara komite audit dengan <i>good corporate governance</i> .
B.	Kualifikasi Anggota Komite Audit (X₂)	1) Independensi. 2) <i>Financial Literacy</i> . 3) <i>Financial Expertise</i> . 4) Kemampuan di bidang akuntansi. 5) Kemampuan analisis laporan keuangan. 6) <i>Communication skill</i> . 7) Kemampuan berorganisasi. 8) <i>Leadership skill</i> . 9) Kemampuan di bidang auditing. 10) Memahami bisnis dan operasi perusahaan. 11) Memahami Sistem Pengendalian Internal perusahaan. 12) Memiliki komitmen terhadap perusahaan. 13) Memahami etika bisnis dan profesi.

C.	Fungsi Komite Audit (X₃)	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Meng-up date</i> pengetahuan. 2) Mempunyai program kerja tertulis. 3) Mengadakan pertemuan rutin. 4) Mengawasi proses pelaporan keuangan. 5) Membantu peningkatan kualitas laporan keuangan. 6) Menelaah kebijaksanaan akuntansi perusahaan. 7) Bekerja sama dengan auditor. 8) Memfasilitasi komunikasi auditor dengan dewan direksi. 9) Menelaah audit program dari auditor eksternal. 10) Menelaah efektifitas auditor eksternal. 11) Membantu penentuan auditor eksternal. 12) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan komisaris. 13) Menelaah efektivitas Sistem Pengendalian Internal perusahaan dan menilai kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal. 14) Meninjau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
D.	Manfaat Komite Audit bagi Manajemen (X₄)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengambilan keputusan. 2) Pengelolaan perusahaan. 3) Komunikasi manajemen dengan dewan komisaris. 4) Pengawasan. 5) Pencapaian tujuan. 6) Peningkatan kinerja.
E.	Manfaat Komite Audit bagi Perusahaan (X₅)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Efektivitas fungsi audit. 2) Kepercayaan <i>stockholders</i>. 3) Kepercayaan publik. 4) Pelaksanaan tugas dewan komisaris. 5) Kinerja perusahaan. 6) Harga saham. 7) Penerapan <i>good corporate governance</i> dalam perusahaan.

Sumber : Indriyani (2002)

3.4 Uji Kualitas Data

3.4.1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi dan arti sebenarnya yang diukur. Validitas ini ditunjukkan dengan indeks yang

menggambarkan kemampuan alat ukur tersebut untuk mengukur. Penentuan nilai signifikansi suatu pertanyaan ditentukan berdasarkan tabel *r-product moment* dengan tingkat signifikansi 5% dan 1% (Singarimbun dan Effendi, 1995). Validitas data ditentukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} (Santoso, 2002). Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka derajat bebas $(db)n-2$ dengan tingkat signifikansi 5 %, maka pernyataan dinyatakan valid dan sebaliknya.

Adapun rumus untuk menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

- r = korelasi antara masing-masing pernyataan
- X = skor pernyataan nomor 1
- Y = skor total
- XY = skor pernyataan nomor 1 dikalikan skor total
- N = ukuran populasi

Sumber : Singarimbun, dan Effendi (1995)

3.4.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran (Umar, 2001). Dengan kata lain, uji reliabilitas ini untuk menilai tingkat konsistensi di antara butir-butir pernyataan kuesioner dengan melakukan uji koefisien korelasi alpha dari Cronbach dengan formula sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum ab^2}{a^2} \right]$$

Dimana :

- r_{11} = reliabilitas instrumen
 k = banyaknya butir pertanyaan
 $\sum \alpha b^2$ = jumlah varian butir
 α^2 = varian total

Nilai reliabilitas ini dapat dikaitkan pula dengan jumlah butir pernyataan yang diuji. Sebagaimana diungkapkan oleh Ebel dan Frisbie (1992) dalam Widayanti (2001) bahwa hubungan jumlah butir dengan reliabilitas dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Hubungan Jumlah Butir dengan Reliabilitas

Jumlah butir	Reliabilitas
5	0,2
10	0,33
20	0,50
40	0,67
80	0,80
160	0,89
640	0,97

Sumber : Ebel dan Fresbie, 1991, dalam Widayanti 2001.

Variabel pemahaman (X_1) berkaitan dengan tingkat pengetahuan manajemen tentang konsep-konsep serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Variabel pemahaman menunjukkan bagaimana pengetahuan manajemen perusahaan *go public* terhadap konsep-konsep *good corporate governance* dan juga tentang komite audit. Variabel kualifikasi (X_2) mengungkapkan persepsi manajemen tentang kualifikasi individu yang diharapkan menempati posisi sebagai anggota komite audit. Variabel fungsi (X_3) berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan komite audit dalam melakukan tugasnya. Sedangkan variabel komite audit bagi manajemen (X_4) dan bagi

perusahaan (X_5) berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh perusahaan atas keberadaan komite audit baik bagi manajemen maupun perusahaan tersebut.

3.4.3 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data ini digunakan untuk menentukan seberapa baik sebuah sampel menjajaki distribusi tertentu. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel telah diambil secara random dari populasinya dan variabel yang dianalisis memenuhi kriteria sebaran normal atau distribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan alat uji *One-Sample Kolmogorof Smirnov* yang digunakan untuk menentukan seberapa baik sebuah sampel dapat menjajaki distribusi teoritis tertentu (Rahman, 1999).

Uji *One-Sample Kolmogorof Smirnov* ini menggunakan pengujian dua sisi, yaitu dengan membandingkan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) dan probabilitas. Apabila probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi, maka sebaran data penelitian adalah normal. Sebaliknya jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka sebaran data tidak normal.

Jika sampel berdistribusi normal maka alat uji statistiknya adalah statistik parametrik dan jika sampel berdistribusi tidak normal maka alat uji statistiknya adalah statistik nonparametrik (Umar, 2002).

3.5 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat apakah rata-rata tingkat persepsi kelompok responden yang satu berbeda atau sama, lebih besar atau lebih kecil dari kelompok yang dibandingkan. Pemilihan teknik pengolahan data ini didasarkan pada skala pengukuran yang digunakan yaitu skala ordinal. Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan uji beda yaitu Mann-Whitney U. Uji Mann-Whitney U digunakan untuk mengetahui persepsi antara dua kelompok independen, pengujian hipotesis ini dilakukan dengan klasifikasi yang dilakukan oleh penulis. Uji Mann-Whitney U berdasarkan level manajemen, yaitu antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah.

3.6 Analisis Deskriptif

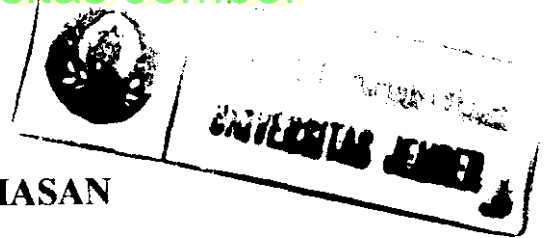
Untuk menggambarkan karakteristik responden, yaitu dengan menggunakan metode distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah merupakan pengorganisasian sekumpulan data melalui proses peringkasan jumlah frekuensi terjadinya nilai tertentu dari suatu variabel (Indriantoro dan Supomo, 2002).

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah secara induktif, yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data untuk kemudian melakukan pembahasan atas permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan difokuskan pada hasil kuesioner yang diberikan kepada responden.

Proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui tahap-tahap berikut ini :

1. *Editing*, dilakukan untuk memeriksa kelengkapan jawaban dari kuesioner, untuk mendapatkan data yang berkualitas sehingga memudahkan proses pengolahan data.
2. *Coding*, pemberian kode untuk memberikan identitas pada data yang telah diklasifikasikan.
3. *Processing* (Pemrosesan Data) merupakan proses untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Profil Perbankan

Penulis dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 10 perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau Bursa Efek Surabaya (BES) dan memiliki kantor cabang di Jember. Adapun daftar perbankan tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

Daftar Perbankan *Go Public* Yang Memiliki Kantor Cabang Di Jember

No.	Nama Bank	Tanggal Berdiri	Tanggal <i>Go Public</i>
1.	Bank Nasional Indonesia	11 Januari 1901	25 November 1996
2.	Bank Central Asia	10 Oktober 1955	31 Mei 2000
3.	Bank Rakyat Indonesia	16 Desember 1895	10 Oktober 2003
4.	Bank Danamon	11 Januari 1901	6 Desember 1989
5.	Bank Mandiri	2 Oktober 1998	14 Juli 2003
6.	Bank Permata	17 Desember 1954	15 Januari 1990
7.	Bank Lippo	11 Maret 1948	10 November 1989
8.	Bank Internasional Indonesia	15 Mei 1959	21 November 1989
9.	Bank Niaga	11 Januari 1901	29 November 1989
10.	Bank Buana	1 November 1956	28 Juli 2000

Sumber : <http://www.jsx.co.id>

Dikarenakan faktor kondisional dari perbankan yang menjadi sampel penelitian yaitu kesibukan pembukuan pada akhir tahun, maka jumlah sampel yang bersedia hanya lima bank (50 % dari jumlah sampel awal yang akan digunakan). Adapun sampel penelitian ini yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Danamon, Bank

Permata. Profil perbankan *go public* dan memiliki kantor cabang di Jember dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Pada awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri BRI adalah Raden Aria Wirjaatmadja. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan

Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% di tangan Pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini BRI mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. (www.bri.co.id)

Pada saat tercatat di Bursa Efek Jakarta tanggal 10 Oktober 2003, harga perdana sahamnya Rp. 875,00, modal dasarnya Rp. 5.000.000.000.000,00, dan modal disetornya Rp. 5.000.000.000.000,00. (www.jsx.co.id)

2) Bank Mandiri

Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia.

Bank Dagang Negara merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi *Escomptobank NV*. Selanjutnya, pada tahun 1960 *Escomptobank* dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah Bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan.

Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda *De Nationale Handelsbank NV*, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, *Chartered Bank* (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.

Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda *N.V. Nedertansche Handels Maatschappij* yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Ekspor-Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata.

Kiri, Bank Mandiri menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. Masing-masing dari empat Bank bergabung memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. (www.mandiri.co.id)

Pada saat tercatat di Bursa Efek Jakarta tanggal 14 Juli 2003, harga perdana sahamnya Rp. 675,00, modal dasarnya Rp. 1.600.000.000,00, dan modal disetornya Rp. 425.100.000.000,00. (www.jsx.co.id)

3) Bank Internasional Indonesia (BII)

Didirikan sebagai bank komersial dengan nama PT Bank Internasional Indonesia pada tahun 1959, dan ditetapkan menjadi bank umum devisa pada tahun 1988. BII kemudian melakukan Penawaran Umum Saham di tahun 1989, dan terus melebarkan sayap hingga menjadi salah satu bank swasta nasional terkemuka di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan berbagai penghargaan yang diterima BII, dari berbagai institusi dalam maupun luar negeri, baik di bidang layanan maupun dalam implementasi teknologi.

Menyusul krisis moneter yang menyerang Asia di tahun 1997, BII mendapat kepercayaan dari pemerintah Indonesia untuk mengikuti program rekapitalisasi perbankan nasional. Konsolidasi, merupakan langkah strategis yang dilakukan BII di tahun 2002. Perbaikan struktur permodalan melalui mekanisme *right issue* telah dilakukan. Selain memperbaiki struktur permodalan, tugas berat yang telah diselesaikan Manajemen BII adalah mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat. Melalui tema perpaduan, Manajemen menyampaikan pentingnya menyatukan segala kehandalan yang dimiliki insan BII, untuk menyediakan layanan dan produk perbankan kepada nasabah yang beragam.

Tahun 2002 ditutup dengan peningkatan kinerja yang menggembirakan, yang terlihat dari angka-angka indikator awal seperti jumlah simpanan sebesar Rp. 29,5 triliun yang sebelumnya di bulan Mei sebesar Rp. 23,3 triliun, melebihi jumlah pada saat krisis. Rasio NPL pada 31 Desember 2002 sebesar 9,02% menurun drastis dibandingkan dengan 31 Desember 2001 yang mencapai 60,98%.

Saat ini, BII merupakan salah satu bank yang masuk ke dalam jajaran 6 besar bank dengan total asset terbesar di Indonesia, yaitu Rp. 34,5 Trilyun pada Juni 2003. Dengan jumlah nasabah lebih dari dua juta rekening di 250 lebih kantor cabang (4 di antaranya di luar negeri). Jaringan perbankan *online* di seluruh Indonesia, yang didukung dengan ATM sebanyak 700 unit, dan terhubung ke 3.000 ATM ALTO yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 8.000 ATM Cirrus di seluruh dunia. Juga *debit card* yang dapat digunakan di 5,6 Juta *merchant* yang tersebar di seluruh dunia. BII juga merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang menyediakan ATM dalam mata uang Dollar Amerika. Selain juga dikenal sebagai salah satu *pioneer* pada layanan *virtual banking*, termasuk di dalamnya fasilitas *Internet Banking*, *Corporate Online Banking (CoolBanking)*, dan *Phone Banking*. Selain menyediakan layanan untuk pribadi istimewa yakni Platinum, baik untuk nasabah reguler dan maupun nasabah yang ingin menikmati layanan berbasis syariah.

BII memiliki baik wahana maupun wacana yang diperlukan guna memainkan peran kunci di sektor perbankan nasional. Dengan berbagai pembaharuan yang telah dan sedang dilakukan oleh manajemen baru, dan dengan di dukung oleh 8.000 karyawan. BII siap untuk melayani nasabahnya dengan lebih baik dan peduli. (www.bii.co.id)

Pada saat tercatat di Bursa Efek Jakarta tanggal 21 November 1989, harga perdana sahamnya Rp. 11.000,00, modal dasarnya Rp. 3.868.000.000.000,00, dan modal disetornya Rp. 1.617.222.000.000,00. (www.jsx.co.id)

4) Bank Permata

Bank Permata merupakan bank hasil penggabungan dari 5 (lima) bank di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot, dimana PT Bank Bali Tbk telah ditunjuk menjadi Bank Rangka (*Platform Bank*) dan berganti nama menjadi Bank Permata, sedangkan keempat bank lainnya sebagai Bank yang menggabungkan diri.

Penggabungan (merger) 5 bank ini merupakan implementasi dari keputusan Pemerintah mengenai Program Restrukturisasi Lanjutan yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2001. Proses merger dimulai dengan penandatanganan kesepakatan pendahuluan antara kelima bank peserta merger dan BPPN pada tanggal 20 Mei 2002 dan legal merger dinyatakan efektif pada tanggal 30 September 2002 setelah dikeluarkannya persetujuan dari Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tujuan dari merger tersebut adalah untuk membentuk suatu bank yang memiliki struktur permodalan yang kuat, kondisi keuangan yang sehat dan berdaya saing tinggi dalam menjalankan fungsi intermediasi, dengan jaringan layanan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Oleh karena itu, pola dari merger yang menghasilkan Bank Permata ini adalah dengan menggabungkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing Bank Peserta Merger menjadi satu kesatuan sinergi yang positif. Untuk itu pula, BPPN mewakili Pemerintah telah melakukan Penempatan Modal Sementara sebesar Rp 4,6 triliun yang terdiri dari setoran tunai sebesar Rp 2,8 triliun dan penerbitan obligasi Pemerintah bersuku bunga tetap sebesar Rp 1,8 triliun.

Bank Permata dengan total aset konsolidasi Rp 28,03 triliun per 31 Desember 2002 memiliki jaringan distribusi yang mencakup 328 kantor cabang dan 456 ATM yang tersebar di 30 kota dan 15 propinsi, layanan *telebanking* PermataTel dan fasilitas *internet banking* PermataNet serta layanan *sms banking* yang dapat diakses kapan saja dan dari manapun.

Adapun segmen pasar yang menjadi target utama Bank Permata adalah segmen nasabah dengan tingkat pendapatan menengah ke atas (untuk segmen ritel), segmen usaha kecil dan menengah (UKM) melalui portofolio kredit yang terdiversifikasi dengan baik dan tetap mempertahankan pangsa pasar di segmen otomotif (untuk segmen komersial).

Nama Bank Permata merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai cerminan bank yang bersahabat, penuh perhatian dan mengutamakan kualitas dalam pelayanan, yang didukung oleh *Permata Banker* yang profesional. Brand name dan logo baru Bank Permata yang diluncurkan pada tanggal 18

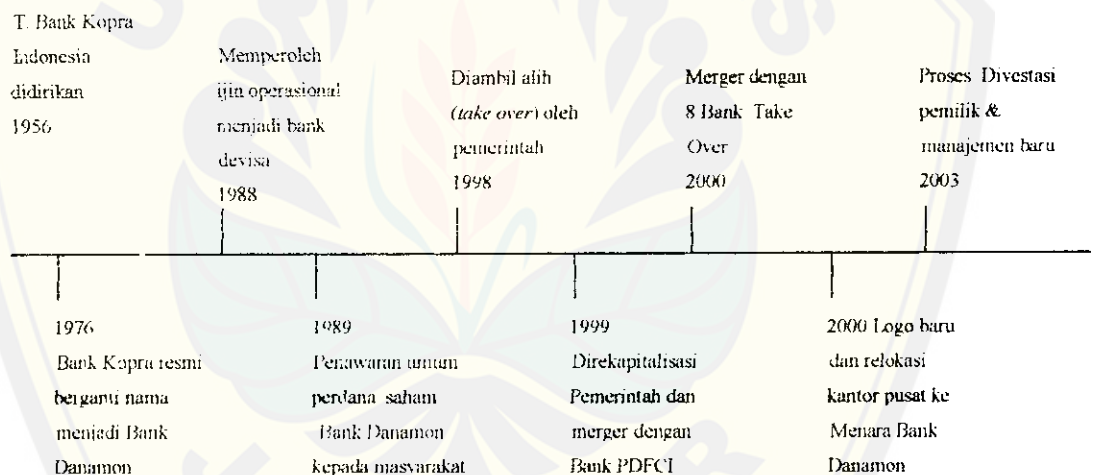
Februari 2003 terdiri dari kumpulan 3 (tiga) warna, yaitu biru, merah dan hijau. Biru mencerminkan keabadian, merah mencerminkan semangat, dan hijau mencerminkan kemakmuran.

Dengan moto “**MENJADIKAN HIDUP LEBIH BERNILAI**”, Bank Permata hadir untuk membantu nasabah mewujudkan hidup yang nyaman dan aman selalu. (www.permatabank.com)

Pada saat tercatat di Bursa Efek Jakarta tanggal 15 Januari 1990, harga perdana sahamnya Rp. 9.900,00, modal dasarnya Rp. 1.600.000.000.000,00, dan modal disetornya Rp. 1.300.534.000.000,00. (www.jsx.co.id)

5) Bank Danamon

Sejarah dari berdirinya Bank Danamon dapat dijelaskan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1 : Proses Berdirinya Bank Danamon

Sumber : www.danamon.co.id

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) didirikan pada tahun 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 namanya menjadi Bank Danamon Indonesia hingga kini. Bank Danamon menjadi bank devisa swasta pertama di Indonesia tahun 1976 dan Perseroan Terbuka pada tahun 1989. Pada tahun 1997, sebagai akibat krisis moneter Asia, Bank Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank BTO. Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia melalui

BPPN merekapitalisasi Bank Danamon dengan obligasi pemerintah senilai Rp 32 triliun. Saat itu juga, sebuah bank BTO dilebur ke perseroan sebagai bagian dari program pembenahan BPPN.

Pada tahun 2000, delapan bank BTO lainnya dilebur ke dalam Bank Danamon. Namun sebagai *surviving entity*, Bank Danamon bangkit menjadi salah satu pilar perbankan nasional. Dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya, Bank Danamon melakukan restrukturisasi luas mencakup manajemen, manusia, organisasi, sistem, nilai perilaku serta identitas perusahaan. Upaya ini berhasil meletakkan fondasi maupun prasarana baru bagi Perseroan guna meraih pertumbuhan berdasarkan transparansi, responsibilitas, integritas dan profesionalisme (TRIP).

Pada tahun 2003, Bank Danamon diambil alih oleh Konsorsium Asia Finance Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. Dengan kendali manajemen baru, serta modal 180-hari pemetaan modal bisnis dan strategi baru, Bank Danamon terus menjalani perubahan transformasional yang dirancang untuk dijadikannya sebagai bank nasional terkemuka dan pelaku regional unggulan. (www.danamon.co.id)

Pada saat tercatat di Bursa Efek Jakarta tanggal 6 Desember 1989, harga perdana sahamnya Rp. 11.000,00, modal dasarnya Rp. 2.200.000.000,00, dan modal disetornya Rp. 3.562.261.000.000,00. (www.jsx.co.id)

4.2 Demografi Responden

Pada penelitian ini, penulis mengambil sampel 10 bank yang telah *go public*, tetapi hanya lima perbankan yang bersedia menjawab kuesioner dari penulis. Alasan ketidakbersediaan mereka sifatnya kondisional, yaitu kesibukan pembukuan pada akhir tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat berjalan lancar karena kerja sama dari semua staf perbankan yang ada. Dengan jawaban dari kelima bank tersebut, penulis berpendapat bahwa jawaban sudah mewakili opini karena jumlah sampel sudah melebihi sampel penelitian (18 orang responden) dan perbankan

yang menjadi objek penelitian adalah 50 % dari jumlah yang ada, yaitu 5 bank (dari 10 perbankan yang telah *go public* dan memiliki kantor cabang di Jember).

Adapun deskripsi mengenai proses pengumpulan kuesioner yang dilakukan oleh penulis ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4.2

Deskripsi Proses Pengumpulan Kuesioner

Kuesioner yang disebar	25
Kuesioner yang kembali	20
Persentase Pengembalian	80 %
Kuesioner Tidak Layak Uji	0
Kuesioner Valid	20
Prosentase Kuesioner Valid (dari yang disebar)	80 %

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan penelitian penulis demografi responden penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Klasifikasi Responden	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
Pria	14	70
Wanita	6	30
Jumlah	20	100

2. Berdasarkan Umur

Tabel 4.4

Responden Berdasarkan Umur

Klasifikasi Responden	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
< 30 Tahun	1	5
30 – 40 Tahun	13	65
>40 Tahun	6	30
Jumlah	20	100

3. Berdasarkan Departemen

Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Departemen

Klasifikasi Responden	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
Internal Auditor	-	-
Non Keuangan	7	35
Akuntansi / Keuangan	5	25
Lain-lain	8	40
Jumlah	20	100

4. Berdasarkan Tingkatan Manajemen

Tabel 4.6
Responden Berdasarkan Tingkatan Manajemen

Klasifikasi Responden	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
Top Manajemen	5	25
Middle Manajemen	15	75
Jumlah	20	100

5. Berdasarkan Lama Jabatan

Tabel 4.7
Responden Berdasarkan Lama Jabatan

Klasifikasi Responden	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
< 5 Tahun	6	30
5 – 10 Tahun	8	40
> 10 Tahun	6	30
Jumlah	20	100

6. Berdasarkan Strata Pendidikan

Tabel 4.8
Responden Berdasarkan Strata Pendidikan

Klasifikasi Responden	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
S1	12	60
S2	3	15
S3	-	-
Lain-lain	5	25
Jumlah	20	100

7. Berdasarkan Bidang Studi Pendidikan

Tabel 4.9

Responden Berdasarkan Bidang Studi Pendidikan

Klasifikasi Responden	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
Keuangan	14	70
Non Keuangan	6	30
Jumlah	20	100

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item-item dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang kuat terhadap skor total. Pengujian terhadap validitas ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Product Moment / Pearson*. Untuk menguji signifikansi korelasi dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf signifikansi 5 %. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5 %, maka dapat dinyatakan bahwa item kuesioner adalah valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item kuesioner dinyatakan tidak valid. Hasil pengujian validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Keterangan
Pemahaman terhadap konsep komite audit (X_1)	$X_{1.1}$	0,949	Valid
	$X_{1.2}$	0,949	Valid
	$X_{1.3}$	0,886	Valid
	$X_{1.4}$	0,301	Valid
	$X_{1.5}$	0,688	Valid
	$X_{1.6}$	0,787	Valid
	$X_{1.7}$	0,681	Valid
	$X_{1.8}$	0,312	Valid

	X _{1,9}	0,667	Valid
Kualifikasi Anggota Komite Audit (X₂)	X _{2,1}	0,549	Valid
	X _{2,2}	0,029	Tidak Valid
	X _{2,3}	0,711	Valid
	X _{2,4}	0,908	Valid
	X _{2,5}	0,805	Valid
	X _{2,6}	0,807	Valid
	X _{2,7}	0,689	Valid
	X _{2,8}	0,843	Valid
	X _{2,9}	0,827	Valid
	X _{2,10}	0,829	Valid
	X _{2,11}	0,640	Valid
	X _{2,12}	0,882	Valid
	X _{2,13}	0,715	Valid
Fungsi Komite Audit (X₃)	X _{3,1}	0,377	Valid
	X _{3,2}	0,678	Valid
	X _{3,3}	0,856	Valid
	X _{3,4}	0,641	Valid
	X _{3,5}	0,856	Valid
	X _{3,6}	0,771	Valid
	X _{3,7}	0,516	Valid
	X _{3,8}	0,321	Valid
	X _{3,9}	0,188	Tidak Valid
	X _{3,10}	0,047	Tidak Valid
	X _{3,11}	0,897	Valid
	X _{3,12}	0,523	Valid
	X _{3,13}	0,683	Valid
	X _{3,14}	0,031	Tidak Valid
	X _{3,15}	0,095	Tidak Valid
Manfaat Komite Audit bagi	X _{4,1}	0,067	Tidak Valid

Manajemen (X₄)	X _{4.2}	0,105	Tidak Valid
	X _{4.3}	0,558	Valid
	X _{4.4}	0,385	Valid
	X _{4.5}	0,767	Valid
	X _{4.6}	0,629	Valid
Manfaat Komite Audit bagi Perusahaan (X₅)	X _{5.1}	0,729	Valid
	X _{5.2}	0,748	Valid
	X _{5.3}	0,867	Valid
	X _{5.4}	0,349	Valid
	X _{5.5}	0,861	Valid
	X _{5.6}	0,877	Valid
	X _{5.7}	0,740	Valid
	X _{5.8}	0,802	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Pengujian terhadap validitas ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Product Moment / Pearson* dan nilai perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 2. Dari tabel 4.10 di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban kuesioner yang didapatkan oleh penulis valid dan data tersebut dapat diolah karena r_{hitung} lebih besar r_{tabel} , dimana r_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % adalah 0,288. Pada variabel kualifikasi anggota komite audit (X₂), fungsi komite audit (X₃), manfaat komite audit bagi manajemen (X₄) terdapat beberapa item yang tidak valid yaitu item X_{2.2}, X_{3.9}, X_{3.10}, X_{3.14}, X_{3.15}, X_{4.1}, X_{4.2} dan selanjutnya jawaban dari item tersebut tidak diikutsertakan dalam analisis data.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 10.0. Suatu instrumen akan semakin reliabel apabila koefisien alphanya semakin mendekati nilai 1. Sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 di atas, berkaitan dengan hubungan antara jumlah butir dengan reliabilitas, maka peneliti menentukan tingkat reliabilitas minimal 0,67. Hasil pengujian dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Koef. Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Pemahaman Terhadap Konsep <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Komite Audit (X_1)	0,8730	Reliabel
2.	Kualifikasi Komite Audit (X_2)	0,9181	Reliabel
3.	Fungsi Komite Audit (X_3)	0,7978	Reliabel
4.	Manfaat Bagi Manajemen (X_4)	0,8450	Reliabel
5.	Manfaat bagi Perusahaan (X_5)	0,8948	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah.

Dari tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien alpha masing-masing variabel (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5) adalah : 0,8730; 0,9181; 0,7978; 0,8450; 0,8948. Dengan melihat nilai-nilai tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing variabel dapat disebut reliabel karena mempunyai koefisien alpha lebih dari 0,67 dan cenderung semakin mendekati 1 (satu), sehingga butir-butir pernyataan tersebut layak untuk diuji.

4.3.3 Uji Normalitas Data

Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji *One-Sample Kolmogorof Smirnov* (K-S) yang pada dasarnya dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara distribusi skor observasi dengan suatu distribusi teoritis tertentu, dimana distribusi adalah distribusi normal. Hasil olahan data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai K-S total adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Kolmogorof Smirnov

		X1	X2	X3	X4	X5
N		20	20	20	20	20
Normal Parameters	Mean	37.25	52.75	59.30	22.70	34.25
	Std. Deviation	4.24	6.01	3.70	1.13	4.91
Most Extreme Differences	Absolute	.266	.234	.168	.205	.133
	Positive	.266	.234	.133	.195	.121
	Negative	-.162	-.169	-.168	-.205	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		1.189	1.045	.750	.916	.597
Asymp. Sig. (2-tailed)		.118	.224	.627	.371	.869

Sumber : Lampiran 5

Uji normalitas dengan menggunakan K-S memiliki ketentuan jika p value > 0,05 berarti data berdistribusi normal. Dari hasil uji K-S disimpulkan bahwa data yang dihasilkan benar-benar berdistribusi normal. Dari tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa p value : 0,118; 0,224; 0,627; 0,371; dan 0,869 sehingga data yang diperoleh adalah data normal karena lebih besar dari 0,05.

4.4 Analisis Data dan Pembahasan

Tingkatan manajemen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tingkat, yaitu manajemen tingkat menengah (*middle manajemen*) dan manajemen tingkat atas (*top manajemen*). Oleh karena itu untuk mengetahui perbedaan persepsi antara dua kelompok tingkatan manajemen perbankan yang menjadi responden penelitian, penulis menggunakan Mann-Whitney U Test yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.13

Hasil Mann-Whitney U Test Persepsi Manajemen Terhadap Manfaat Dan Fungsi Komite Audit Ditinjau dari Tingkatan Manajemen

Variabel (Simbol)	Rata-rata (Mean)		Mann-Whitney U Test	
	Top Mangt.	Middle Mangt.	Z. Score	Sig.(2 tailed)
Pemahaman Terhadap Konsep <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Komite Audit (X_1)	7,50	11,50	-1,329	0,184
Kualifikasi Komite Audit (X_2)	12,10	9,97	-0,707	0,479
Fungsi Komite Audit (X_3)	7,90	11,37	-1,145	0,252
Manfaat Bagi Manajemen (X_4)	10,30	10,57	-0,092	0,927
Manfaat bagi Perusahaan (X_5)	7,80	11,40	-1,190	0,234
Total	108,6	54,81	-4,463	2,076

Sumber : Lampiran 7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel mempunyai nilai di atas 0,05. Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara responden dengan posisi sebagai manajemen tingkat menengah dan tingkat atas. Kondisi ini merupakan kondisi yang diharapkan, karena peran dari masing-masing tingkatan manajemen tersebut pada dasarnya adalah sama. Meskipun secara struktural, manajemen tingkat menengah berbeda dengan manajemen tingkat atas namun apabila dikaitkan dengan peran masing-masing fungsi tersebut pada pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan perusahaan dapat dikatakan saling mendukung fungsi masing-masing.

Pada hipotesis yang dirumuskan pada Bab II, yaitu :

H_0 : Tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya dan memiliki Kantor Cabang di Jember.

H_1 : Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya dan memiliki Kantor Cabang di Jember.

Dari tabel 4.13 di atas dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, ini berarti bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memperoleh kesimpulan, tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya dan memiliki Kantor Cabang di Jember. Dengan adanya kesimpulan dari H_0 tersebut, maka hipotesis :

H_1 : Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta memiliki Kantor Cabang di Jember.

tidak terbukti. Karena kesimpulan sudah menyebutkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta memiliki Kantor Cabang di Jember.

Tabel 4.14 di bawah ini adalah tabel hasil analisis Mann Whitney U yang dipergunakan untuk memperkuat penjelasan hipotesis.

Tabel 4.14
Test Statistics Mann Whitney U

	X1	X2	X3	X4	X5
Mann-Whitney U	22,500	29,500	24,500	36,500	24,000
Wilcoxon W	37,500	149,500	39,500	51,500	39,000
Z	-1,329	-,707	-1,145	-,092	-1,190
Asymp. Sig. (2-tailed)	,184	,479	,252	,927	,234
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,197	,497	,266	,933	,266

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan tabel pengujian Mann Whitney U di atas, dapat diambil keputusan dengan ketentuan sebagai berikut : Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima, dan jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Terlihat pada hasil pengujian pada kolom *Asymp.Sig.(2-tailed) asymptotic significance* untuk dua sisi adalah: 0,184;0,479;0,252,0,927,0,234 (lihat tabel 4.14). Hal tersebut berarti bahwa dari kelima variabel penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu : Pengetahuan (X_1), Kualifikasi (X_2), Fungsi Komite Audit (X_3), Manfaat Bagi Manajemen (X_4), dan Manfaat bagi Perusahaan (X_5) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya dan memiliki Kantor Cabang di Jember. Dapat disimpulkan juga bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian yang mendukung penelitian Indriyani (2002), yaitu tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah.

Tabel 4.15
Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean	Standar Deviasi
Pemahaman Terhadap Konsep <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dan Komite Audit (X_1)	9 – 45	31 – 44	37,25	4,24
Kualifikasi Komite Audit (X_2)	13 – 65	47 – 65	52,75	6,01
Fungsi Komite Audit (X_3)	15 – 75	53 – 68	59,30	3,70
Manfaat Bagi Manajemen (X_4)	6 – 30	20 - 25	22,70	1,13
Manfaat bagi Perusahaan (X_5)	8 – 40	25 – 40	34,25	4,91

Sumber : Lampiran 6

Hasil analisis data pada tabel 4.15 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang diuji adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Terhadap Konsep *Good Corporate Governance (GCG)* dan Komite Audit (X_1)

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memiliki *mean* 37,25 dan standar deviasi 4,24 yang berarti bahwa tingkatan manajerial perbankan cenderung memiliki pengetahuan yang tinggi atas manfaat dan fungsi komite audit. Karena tujuan utama dari pembentukan komite audit dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan obyektivitas dewan komisaris dan dewan direksi. Oleh karena itu, maka pemahaman terhadap konsep *Good Corporate Governance (GCG)* dan komite audit (X_1) mutlak diperlukan oleh responden.

2. Kualifikasi Anggota Komite Audit (X_2)

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memiliki *mean* 52,75 dan standar deviasi 6,01 yang berarti bahwa tingkatan manajerial perbankan cenderung mengetahui kualifikasi anggota komite audit. Hal ini dikarenakan komite audit memegang peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham serta menyeimbangkan hubungan auditor dengan manajemen. Efektivitas komite audit juga ditentukan oleh kejelasan tentang komposisi, kualifikasi, tugas, maupun fungsi dan tanggung jawabnya. Sehingga apa yang menjadi kualifikasi anggota komite audit haruslah dipahami oleh manajemen perusahaan karena menyangkut independensi, kompetensi, komitmen, dan kompensasi dalam melakukan tugasnya.

3. Fungsi Komite Audit (X_3)

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memiliki *mean* 59,30 dan standar deviasi 3,70 yang berarti bahwa tingkatan manajerial perbankan cenderung memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat dan fungsi komite audit. Dari hasil penelitian mengenai manfaat dan fungsi komite audit (X_3), diketahui bahwa manfaat dan fungsi komite audit bagi perbankan yaitu:

- 1) Memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.
- 2) Memungkinkan dewan komisaris untuk memberikan penilaian yang independen atas kinerja keuangan perusahaan.

- 3) Memperkuat posisi auditor eksternal dalam memberikan rekomendasi perbaikan.
- 4) Memperkuat independensi dan obyektivitas auditor internal.
- 5) Meningkatkan keyakinan publik, khususnya investor, terhadap perusahaan.
- 6) Mengurangi peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan.

Fungsi utama keberadaan komite audit dalam perusahaan adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mereview informasi keuangan yang disediakan bagi para pemegang saham maupun pihak lain, menilai sistem pengendalian internal serta proses audit eksternal.

Jumlah anggota komite audit pada dasarnya dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan berkaitan dengan ukuran perusahaan serta fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan kepada komite audit. Komite audit memegang peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham serta menyeimbangkan hubungan auditor dengan manajemen. Efektifitas komite audit juga ditentukan oleh kejelasan tentang komposisi, kualifikasi, tugas, maupun fungsi dan tanggung jawabnya.

Secara kualitatif, hal yang paling penting bagi anggota komite audit dalam melaksanakan fungsi komite adalah sifat independensinya. Independensi merupakan elemen kritis yang akan menentukan terlaksananya keseluruhan peran komite audit secara obyektif serta pencapaian manajemen yang akuntabel bagi para pemegang saham (Baridwan, 2002).

4. Manfaat Bagi Manajemen (X_1)

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memiliki *mean* 22,70 dan standar deviasi 1,13 yang berarti bahwa fungsi komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkatan manajerial perbankan yang menjadi responden penelitian. Hal ini dikarenakan manajerial pada tingkatan kantor cabang tidak merasakan manfaatnya secara langsung dengan anggota komite audit.

5. Manfaat bagi Perusahaan (X_5)

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memiliki *mean* 34,25 dan standar deviasi 4,91 yang berarti bahwa komite audit bermanfaat bagi perbankan yang menjadi responden penelitian.

Untuk analisis mengenai manfaat komite audit bagi perusahaan (X_5) pada responden penelitian didapatkan hasil bahwa menurut responden, komite audit memiliki manfaat bagi kegiatan perusahaan. Karena berdasarkan teori pada bab II, komite audit banyak memberikan manfaat lain bagi perusahaan yaitu:

- 1) Memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.
- 2) Memungkinkan dewan komisaris untuk memberikan penilaian yang independen atas kinerja keuangan perusahaan.
- 3) Memperkuat posisi auditor eksternal dalam memberikan rekomendasi perbaikan.
- 4) Memperkuat independensi dan obyektivitas auditor internal.
- 5) Meningkatkan keyakinan publik, khususnya investor, terhadap perusahaan.
- 6) Mengurangi peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan.

Sedangkan fungsi utama keberadaan komite audit dalam perusahaan adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab untuk *me-review* informasi keuangan yang disediakan bagi para pemegang saham maupun pihak lain, menilai sistem pengendalian internal serta proses audit eksternal. Selain fungsi-fungsi dari komite audit di atas, fungsi-fungsi komite audit yang lain adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Fungsi Auditor dan Pengauditan
3. Fungsi Organisasi Perusahaan

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara responden dengan posisi sebagai manajemen tingkat menengah dan tingkat atas. Hal tersebut diharapkan, karena peran dari masing-masing tingkatan manajemen tersebut pada dasarnya adalah sama. Meskipun terdapat perbedaan secara struktural, antara manajemen tingkat menengah berbeda dengan manajemen tingkat atas namun apabila dikaitkan dengan peran masing-masing fungsi tersebut pada pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan perusahaan dapat dikatakan saling mendukung fungsi masing-masing. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Indriyani (2002).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis berusaha melaksanakan penelitian dengan prosedur yang memadai untuk mencapai tujuan penelitian. Namun, penulis menyadari masih banyak keterbatasan yang mungkin mengurangi hasil penelitian, antara lain :

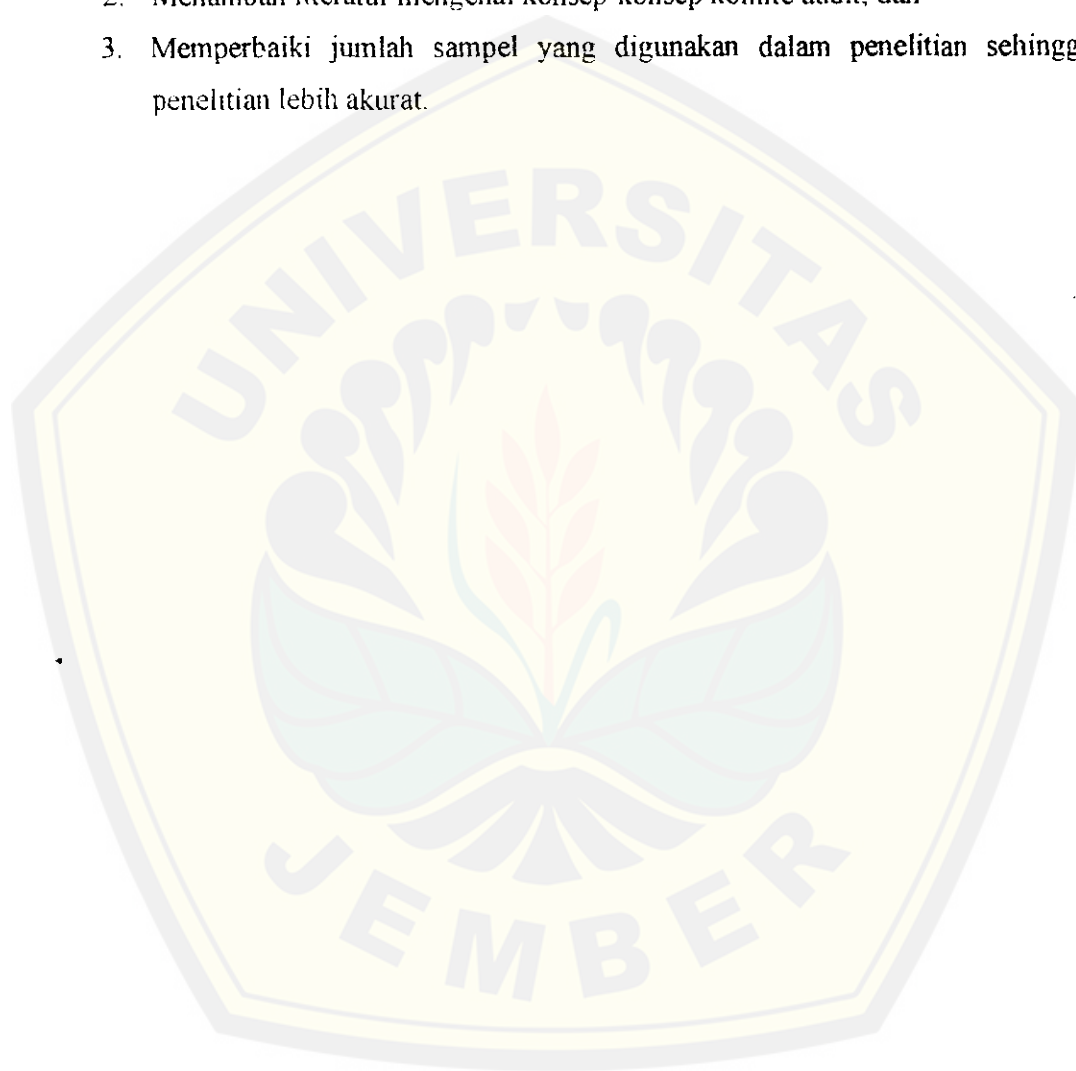
1. Masih terbatasnya literatur maupun penelitian terdahulu yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konsep *Good Corporate Governance*;
2. Masih kurangnya literatur mengenai konsep Komite Audit dan *Good Corporate Governance*;
3. Data primer yang diperoleh oleh penulis belum akurat karena hanya didapatkan dari lima perbankan *go public*. Hal ini akan semakin baik jika data yang didapatkan berasal dari keseluruhan perbankan *go public* dan memiliki Kantor Cabang di Jember (10 bank *go public*).



5.3 Saran

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, penulis berharap bahwa untuk peneliti berikutnya perlu :

1. Menambah literatur khususnya yang berkaitan dengan konsep *good corporate governance*;
2. Menambah literatur mengenai konsep-konsep komite audit; dan
3. Memperbaiki jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sehingga penelitian lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aren, Alvin A., dan Løebbecke, James K. 1994.: *"Auditing and Integrated Approach"*, 6th ed., Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs-New Jersey.
- Baridwan, Anis. 2002. *Tugas Komite Audit Dalam Good Corporate Governance*. FCGI.
- Conference On Corporate Governance In Asia : A Comparative Perspective. 1999. Seoul, 3-5 March 1999. *Corporate governance In Asia And The Asian Financial Crisis : Evidence Of The Impact And Current Trend*. Organization Or Economic Co-Operative And Development In Co-Operation With The Korea Development Institute And With The Co-Sponsorship Of The Government And The World Bank.
- Hasan, Saefuddin. 2000. *Membangun Corporate Governance pada Perusahaan : dari "Buble Company" menuju "Sustainable Company"*. Mimeo, makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional Akuntansi. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 6 – 7 Desember 2000.
- Herwidayatno. 2000. *Peranan BAPEPAM Dalam Penegakan Corporate Governance*. Disampaikan Pada Seminar Sosialisasi *Corporate Governance* Yang Diselenggarakan Atas Kerjasama Universitas Gajah Mada Dan University Of South Carolina, Yogyakarta, 21 Juli 2000.
- Hidayati, Ataina. 2000. *Kunci Sukses Komite Audit*. *JAAI* Volume 4, No. 1, Juni 2000.
- IICG. *Frequently Asked and Question*. 2000. Diakses dari www.iicg.org/faq.html pada tanggal 16 Maret 2004.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Indriyani. 2002. *Manfaat Dan Fungsi Komite Audit Dalam Mewujudkan Tata Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance); Persepsi Manajemen Perusahaan Go Publik*. Skripsi Sarjana. Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- McMullen, D.A. dan K. Rughundan. 1996. "Enhancing Audit Committee Effectiveness". *Journal of Accountancy*. Halaman 18. Edisi Agustus.

- OECD. 2001. OECD Principles Of Corporate Governance. www.oecd.gov .
OECD corporate Affairs.
- Rahman, Taufikur. 1999. Persepsi Akuntan Publik, Masyarakat Bisnis (user) dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kualitas Personal dan Citra Akuntan Publik Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. *Skripsi.*
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian.* Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Purwanto, Heri. 2000. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Dalam Menempuh Mata Kuliah Pengantar Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang. *Skripsi.*
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.* Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei.* Cetakan Kedua. Jakarta : LP3ES.
- Sulistiyanto, H. Sri dan Haris Wibisono. 2003. "Good Corporate Governance : Berhasilkah Diterapkan di Indonesia. *Jurnal Widya Warta.* No. 2 Th XXVI / Juli 2003. Sumber www.artikel.us/hsulistiyanto3.html diakses pada 16 Maret 2004.
- Surat Keputusan Dewan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta, Tbk. No. Kep-315/BEJ/06/2000 Tentang Syarat Penyelenggaraan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik.
- Syakhroza, Akhmad. 2003. *Best Practises Good Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia.* Usahawan No. 06 Th. XXXII Juni 2003, halaman 15.
- Tugiman, Hiro. 1995. *Komite Audit.* Bandung : Penerbit Eresco.
- Tunggal, Amin Wijaya. 2003. *Komite Audit (Audit Committee).* Jakarta : Harvarindo.
- Umar, Husein. 2001. *Riset Akuntansi.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, husein. 2002. *Metode Riset Bisnis.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widayanti, Anna Retno. 2001. *Analisis Keahlian Auditor BPK-RI Menuju Pelaksanaan Fraud Audit.* Skripsi.

_____, 2000. "Pentingnya Sebuah *Good Governance*". *Media Akuntansi*. Th. 1 Maret 2000. Hal. 5 No.7.

_____, 2000. "Etika Sebagai *Benchmarking* Dalam *Good Corporate Governance*". *Media Akuntansi*. Th. 1 Maret 2000.

_____, 2000. "*Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Nasional". *Media Akuntansi*. Th 1 Maret 2000.

_____, 2003. www.bii.co.id

_____, 2003. www.bri.co.id

_____, 2003. www.danamon.co.id

_____, 2003. www.jsx.co.id

_____, 2003. www.mandiri.co.id

_____, 2003. www.permatabank.com

